



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)

=====

Tahun Sidang	:	2010 - 2011
Masa Persidangan	:	IV (Keempat)
Rapat Ke	:	8 (Delapan)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Pendidikan Nasional
Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 Mei 2011
Pukul	:	14.20 – 18.10 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Realisasi APBN TA 2011 Kuartal I 2. Tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI TA 2010 3. Membahas mengenai Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu 4. Membahas hasil Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2011 5. Membahas mengenai masalah Universitas Trisakti 6. Lain-lain
Hadir	:	42 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Menteri Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og., dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan perkenalan Anggota baru yang duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan penjelasan mengenai agenda Rapat oleh Ketua Rapat. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., untuk memimpin Raker ini. Kemudian Pimpinan Rapat baru mempersilahkan

Menteri Pendidikan Nasional untuk memaparkan dan dilanjutkan dengan tanggapan, saran, dan masukan dari anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

A. Realisasi APBN TA 2011 Kuartal I

1. Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas RI agar memperhatikan daya serap APBN TA 2011 kuartal I yang masih rendah Rp5,874T (10,55%) dari Pagu TA 2011 Rp55,667T, yang disebabkan adanya perubahan struktur organisasi Kemendiknas, selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong kepada Kemdiknas RI untuk meningkatkan kinerjanya agar program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Terkait dengan APBN TA 2011, Komisi X DPR RI dan Mendiknas RI sepakat akan melakukan Raker lanjutan dalam waktu dekat dengan agenda Juknis DAK Pendidikan TA 2011 didahului RDP dengan Dirjen Dikdas Kemdiknas RI.

B. Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI TA 2010

Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas RI agar segera menindak lanjuti rekomendasi BPK RI yang belum terselesaikan, utamanya meningkatkan pengendalian dan pengawasan intern atas pengelolaan keuangan negara. Pada tahapan selanjutnya, Kemdiknas RI agar memperhatikan kecepatan dan ketepatan dalam penggunaan dan pelaporan keuangan agar tidak menjadi temuan BPK RI untuk hal yang sama pada tahun berikutnya.

C. HASIL PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2011

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemdiknas RI terhadap pelaksanaan UN 2011 yang telah berjalan lebih baik dibandingkan dengan UN 2010. Namun demikian, untuk penyelenggaraan yang akan datang diperlukan evaluasi secara komprehensif untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

D. AL ZAYTUN

1. Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas RI untuk mengambil langkah yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menangani permasalahan Universitas Al Zaytun mengingat universitas tersebut belum mempunyai izin
2. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Komisi X DPR RI mengharapkan Mendiknas RI untuk melakukan koordinasi dengan Menag RI adanya informasi penerapan kurikulum di MTs dan MA Al Zaytun tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Komisi X DPR RI menghormati amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 821K/PDT/2010 tanggal 28 September 2010 jo. No. 248/PDT/2009 jo No. 410/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR, selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas RI agar mengambil langkah-langkah

terhadap pelaksanaan eksekusi amar Putusan MA RI sebagaimana dimaksud sehingga tidak mengganggu atau menyebabkan terhentinya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Trisakti.

2. Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif langkah-langkah pemecahan permasalahan yang terjadi di Universitas Trisakti untuk jangka panjang.

F. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah mengkaji kembali kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS TA 2011 untuk dikembalikan kepada mekanisme sebelumnya.

G. KURIKULUM

Komisi X DPR RI dan Mendiknas RI sepakat bahwa pendidikan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam 4 (empat) pilar kebangsaan masuk dalam mata pelajaran tersendiri di semua jenis dan jenjang satuan pendidikan.

III. Rapat diakhiri pada pukul 18.10 WIB

Jakarta, 25 Mei 2011
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA,



IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.